

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris : Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- . *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah. “Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS).” *Indonesian Journal of Community Services* 2 (2020).
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Atmosudrdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Nrgara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung, 2010.
- Budiono, Abdul Rachmad. “Modernisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Era Digitalisasi Layanan Publik.” *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara* 3, 2021.
- Dillah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Dyani, Vina Akfa. “Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Jurnal Lex Renaissance* 1 (2017).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hukumonline.com, Website. “Memahami Perkembangan Dan Implementasi Terbaru OSS RBA.” Accessed May 26, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perkembangan-dan-implementasi-terbaru-oss-rba-lt649196526725f/>.
- Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. “RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045.” Kementerian Sekretariat

- Negara Republik Indonesia, 2025.
https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm_n_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (2025).
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2029 (2025).
- Indonesia, Website Resmi Kamus Besar Bahasa. “KBBI: Tanggung Jawab,” 2024.
https://kbbi.web.id/tanggung_jawab.
- Investasi/BKPM, Kementerian. Panduan Penggunaan OSS RBA (2021).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- . *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2010.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Miru dan Sutarman Yodo, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nico, Koeswadi dalam. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris § (2014).
<https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.
- Permana, Sony Hendra. “Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16.” *Jurnal Hukum*, 2018.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia § (2023).
- Sarungu, Gabriella Tiku, and Disriani Latifah Sorindah. “Dampak Kekeliruan Dalam Pemilihan Kode KBLI Pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris Dan Pelaku Usaha” 6, no. 3 (2024): 9033–44.
- Sedarmayanti. *Manajemen Publik: Konsep Dan Aplikasi Dalam Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Edited by Habib Adjie. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (2019).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Taufani, Suteki dan Gilang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (n.d.).

2. Jurnal

- Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah. “Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS).” *Indonesian Journal of Community Services* 2 (2020).
- Budiono, Abdul Rachmad. “Modernisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Era Digitalisasi Layanan Publik.” *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara* 3, 2021.
- Dyani, Vina Akfa. “Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Jurnal Lex Renaissance* 1 (2017).

Permana, Sony Hendra. “Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16.” *Jurnal Hukum*, 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2029.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Website

Website Hukumonline.com. “Memahami Perkembangan Dan Implementasi Terbaru OSS RBA.” Accessed May 26, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perkembangan-dan-implementasi-terbaru-oss-rba-lt649196526725f/>.

Website Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia. “KBBI: Tanggung Jawab,” 2024. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.